



**RENCANA KERJA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN SAMPANG**  
**TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**2020**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang menyusun Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

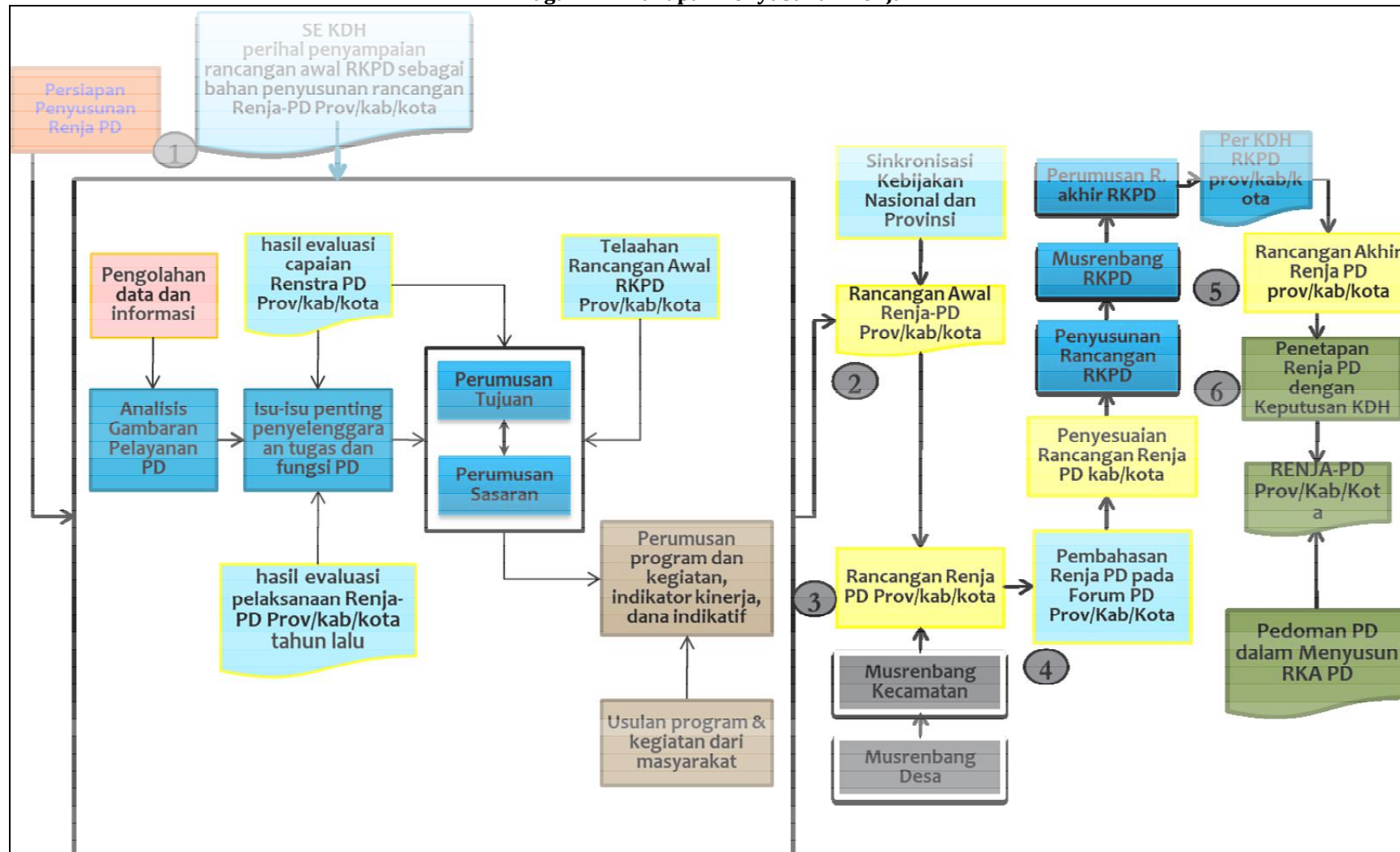
- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Bappelitbangda
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2022.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1  
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yaitu **“Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat melalui penguatan kontribusi sektor unggulan, kesehatan, dan infrastruktur menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya SDM aparatur yang profesional”**.

## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019 -2024;
26. Peraturan Bupati Sampang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
27. Peraturan Bupati Sampang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2021 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2021 secara umum adalah :

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2021, meliputi :

#### **BABI PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2019



- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.5 Faktor-faktor Kunci Keberhasilan
- 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Kegiatannya.

**BAB V PENUTUP**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2019 dan Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisis pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang pada tahun 2019.
- b. Evaluasi Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019-2024 memuat 7 program dan 20 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renja Tahun 2019 dan Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sampai dengan tahun 2020.

Adapun Rekapitulasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2019 dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana terlampir pada tabel T-C.29 di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2020 Kabupaten**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.03.	URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
4.03.4.03.01.15.	Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan Aparatur	a.	Persentase pemenuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan	100%		100%	0%	0.00%	100%	100.00%
		b.	Persentase data kepegawaian yang akurat	100%		100%	90.16%	90.16%	100%	90.16%
		c.	Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin	100%		100%	99.51%	99.51%	100%	99.51%
4.03.4.03.01.15.01.	Penyusunan Perencanaan dan Formasi Kepegawaian	1	Jumlah dokumen formasi yang disusun	6 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100.00%	1 dokumen	33.33%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		2	Jumlah perpanjangan / pemberhentian honorer daerah yang diterbitkan	298 orang		70 orang	85 orang	121.43%	29 orang	114 orang	38.26%
4.03.4.03.01.15.02.	Seleksi Penerimaan Calon ASN	1	Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan Calon ASN	1500 orang		250 orang	0 orang	0.00%	500 orang	500 orang	33.33%
		2	Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan PPPK	600 orang		100 orang	0 orang	0.00%	100 orang	100 orang	16.67%
		3	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	1472 orang		222 orang	0 orang	0.00%	514 orang	514 orang	34.92%
4.03.4.03.01.15.03.	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi, Pengolahan Data dan Identitas Kepegawaian	1	Jumlah aplikasi yang dibangun dan atau dikembangkan	6 paket		1 paket	1 paket	100.00%	1 paket	2 paket	33.33%
		2	Jumlah data kepegawaian yang diupdate	7000 orang		7000 orang	6932 orang	99.03%	7000 orang	13932 orang	199.03%
		3	Jumlah identitas kepegawaian yang diterbitkan (Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, dll)	3600 dokumen		600 dokumen	362 dokumen	60.33%	600 dokumen	962 dokumen	26.72%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.03.4.03.01.15.04.	Penegakan Disiplin Aparatur, LP2P dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	1	Jumlah penetapan penjurusan hukuman disiplin pegawai yang diproses	19 kasus		28 kasus	34 kasus	121.43%	27 kasus	61 kasus	321.05%
		2	Jumlah pelaksanaan sidak setelah Cuti Bersama	1 kali		1 kali	1 kali	100.00%	1 kali	2 kali	200.00%
		3	Jumlah e-LHKPN yang dilaporkan	552 dokumen		92 dokumen	81 dokumen	88.04%	92 dokumen	173 dokumen	31.34%
		4	Jumlah unit KORPRI yang dilakukan pembinaan KORPRI	42 unit KORPRI		0 unit KORPRI	0 unit KORPRI	0.00%	0 unit KORPRI	0 unit KORPRI	0.00%
		5	Jumlah peserta Pembinaan Motivasi Kerja KORPRI	100 orang		100 orang	100 orang	100.00%	100 orang	200 orang	200.00%
4.03.4.03.01.16.	Program Mutasi Kepegawaian	a.	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
4.03.4.03.01.16.01.	Penataan Pegawai Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	1	Jumlah kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan	7 kali		1 kali	0 kali	0%	1 kali	1 kali	14.29%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
		2	Jumlah pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi dan administrasi yang diterbitkan	1300 orang		400 orang	147 orang	37%	200 orang	347 orang	26.69%
		3	Jumlah Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang dilaksanakan	13 kali		4 kali	2 kali	50%	2 kali	4 kali	30.77%
4.03.4.03.01.16.02.	Penataan Pegawai dalam Jabatan Fungsional	1	Jumlah Pengangkatan, Penyesuaian, Pembebasan, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Jabatan Fungsional yang diterbitkan	4800 orang		800 orang	456 orang	57%	800 orang	1256 orang	26.17%
		2	Jumlah Pengangkatan Sumpah Janji / Pelantikan dalam Jabatan Fungsional yang dilaksanakan	23 kali		3 kali	1 kali	33%	4 kali	5 kali	21.74%
		3	Jumlah peserta Sosialisasi Jabatan Fungsional	570 orang		60 orang	60 orang	100%	90 orang	150 orang	26.32%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.03.4.03.01.16.03.	Fasilitasi Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Kesejahteraan Aparatur	1	Jumlah Keputusan Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	9195 orang		1200 orang	1110 orang	93%	1400 orang	2510 orang	27.30%
		2	Jumlah Keputusan Pensiun yang diterbitkan	1166 orang		190 orang	253 orang	133%	175 orang	428 orang	36.71%
		3	Jumlah Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan	11677 orang		1920 orang	1976 orang	103%	1940 orang	3916 orang	33.54%
		4	Jumlah penghargaan (Satya Lencana Karya Satya) yang diproses	662 orang		100 orang	26 orang	26%	105 orang	131 orang	19.79%
		5	Jumlah cuti yang diterbitkan	550 orang		100 orang	131 orang	131%	80 orang	211 orang	38.36%
4.03.4.03.01.17.	Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir	a.	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	7.50%		5%	3.88%	77.60%	6%	6.00%	80.00%
4.03.4.03.01.17.01.	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Penjurangan	1	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Latsar bagi CPNS	1472 orang		73 orang	73 orang	100.00%	296 orang	369 orang	25.07%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		2	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II / Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tk. II (PKN Tk. II)	21 orang		0 orang	0 orang	0.00%	0 orang	0 orang	0.00%
		3	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III	34 orang		0 orang	0 orang	0.00%	0 orang	0 orang	0.00%
		4	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV	180 orang		0 orang	0 orang	0.00%	0 orang	0 orang	0.00%
4.03.4.03.01.17.02.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	1	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	360 orang		67 orang	60 orang	90%	60 orang	120 orang	33.33%
4.03.4.03.01.17.03.	Penyusunan Pengembangan Karir ASN	1	Jumlah aparatur yang mengikuti Uji Kompetensi	640 orang		80 orang	80 orang	100%	30 orang	110 orang	17.19%
		2	Jumlah assesi yang mendapat feedback	440 assesi		0 assesi	0 assesi	0%	0 assesi	0 assesi	0.00%
		3	Jumlah ijin belajar yang diterbitkan	600 orang		100 orang	46 orang	46%	100 orang	146 orang	24.33%



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		4	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar	60 orang		10 orang	10 orang	100%	10 orang	20 orang	33.33%
		5	Jumlah pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Praja IPDN	24 orang		1 orang	1 orang	100%	3 orang	4 orang	16.67%
		6	Persentase aparatur yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	100%		0%	0%	0%	100%	100%	100.00%
		7	Jumlah Unit Kerja yang mengikuti Workshop aplikasi penyusunan rencana pengembangan kompetensi PNS	42 unit kerja		0 unit kerja	0 unit kerja	0%	0 unit kerja	0 unit kerja	0.00%
		8	Jumlah Unit Kerja yang mengikuti sosialisasi pengisian Pengukuran Indeks Profesionalitas (PIP) ASN	80 unit kerja		0 unit kerja	0 unit kerja	0%	0 unit kerja	0 unit kerja	0.00%
		9	Jumlah lomba yang diadakan dalam rangka HUT KORPRI	30 jenis		4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	8 jenis	26.67%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		10	Jumlah pelaksanaan kegiatan Rangkaian HUT KORPRI (Upacara, Resepsi dan Ziarah ke TMP)	18 kegiatan		3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	6 kegiatan	33.33%
		11	Jumlah penerbitan Media KORPRI	4600 eksemplar		600 eksemplar	800 eksemplar	133%	800 eksemplar	1600 eksemplar	34.78%
	<b>PROGRAM ADUM</b>										
4.01.4.01.01.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran</b>	a.	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100.00%</b>		<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
4.01.4.01.01.01.01.	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	19200 surat		3200 surat	3789 surat	118.41%	3200 surat	6989 surat	36.40%
		2	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	72 bulan		12 bulan	12 bulan	100.00%	12 bulan	24 bulan	33.33%
		3	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	144 unit		24 unit	23 unit	95.83%	24 unit	47 unit	32.64%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		4	Jumlah alat kebersihan yang disediakan	180 jenis		30 jenis	30 jenis	100.00%	0 jenis	30 jenis	16.67%
		5	Jumlah tenaga kebersihan	300 orang bulan		60 orang bulan	60 orang bulan	100.00%	48 orang bulan	108 orang bulan	36.00%
		6	Jumlah tenaga penjaga kantor	216 orang bulan		24 orang bulan	24 orang bulan	100.00%	24 orang bulan	48 orang bulan	22.22%
		7	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi / teknis	84 orang bulan		14 orang bulan	14 orang bulan	100.00%	14 orang bulan	28 orang bulan	33.33%
		8	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3650 eksemplar		0 eksemplar	0 eksemplar	0.00%	730 eksemplar	730 eksemplar	20.00%
		9	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	4200 orang kali		0 orang kali	0 orang kali	0.00%	715 orang kali	715 orang kali	17.02%
		10	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	1000 orang kali		0 orang kali	0 orang kali	0.00%	200 orang kali	200 orang kali	20.00%
4.01.4.01.01.01.02.	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	1	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	60 jenis		68 jenis	68 jenis	100.00%	56 jenis	56 jenis	33.33%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		2	Jumlah cetakan yang disediakan	17 jenis		8 jenis	8 jenis	100.00%	7 jenis	7 jenis	33.33%
		3	Jumlah penggandaan	252000 lembar		42000 lembar	52499 lembar	125.00%	36500 lembar	88999 lembar	35.32%
		4	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	18 jenis		18 jenis	18 jenis	100.00%	18 jenis	18 jenis	33.33%
		5	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	730 eksemplar		730 eksemplar	730 eksemplar	100.00%	0 eksemplar	730 eksemplar	100.00%
		6	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	576 orang kali		576 orang kali	574 orang kali	99.65%	0 orang kali	574 orang kali	99.65%
		7	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	100 orang kali		100 orang kali	96 orang kali	96.00%	0 orang kali	96 orang kali	96.00%
		8	Jumlah alat kebersihan yang disediakan	30 jenis		0 jenis	0 jenis	0.00%	30 jenis	30 jenis	20.00%
4.01.4.01.01.01.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti	1581 orang kali		39 orang kali	18 orang kali	46.15%	39 orang kali	57 orang kali	3.61%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		2	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	580 orang kali		27 orang kali	67 orang kali	248.15%	89 orang kali	156 orang kali	26.90%
<b>4.01.4.01.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>99.19%</b>	<b>99.19%</b>	<b>100%</b>	<b>99.19%</b>	<b>99.19%</b>
4.01.4.01.01.02.01.	Pembangunan/Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0 unit		0 unit	0 unit	0.00%	0 unit	0 unit	0.00%
		2	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit		1 unit	1 unit	100.00%	1 unit	2 unit	33.33%
4.01.4.01.01.02.03.	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1	Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan	0 unit		0 unit	0 unit	0.00%	0 unit	0 unit	0.00%
		2	Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan	0 unit		0 unit	0 unit	0.00%	0 unit	0 unit	0.00%
		3	Jumlah kendaraan dinas (R4) yang dipelihara	3 unit		4 unit	4 unit	100.00%	4 unit	8 unit	33.33%
4.01.4.01.01.02.04.	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah pengadaan peralatan kantor	127 unit		12 unit	12 unit	100.00%	92 unit	104 unit	81.89%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		2	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	335 unit		61 unit	61 unit	100.00%	47 unit	108 unit	32.24%
		3	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	28 unit		0 unit	0 unit	0.00%	0 unit	0 unit	0.00%
		4	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	0 unit		0 unit	0 unit	0.00%	0 unit	0 unit	0.00%
		5	Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	160 unit		28 unit	28 unit	100.00%	34 unit	62 unit	38.75%
4.01.4.01.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%		100%	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%
4.01.4.01.01.03.01.	Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Se minar	1	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi /seminar	77 orang kali		10 orang kali	24 orang kali	240.00%	9 orang kali	33 orang kali	42.86%
								100.00%			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.4.01.01.04.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	1	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat wakt	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
4.01.4.01.01.04.01.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	1	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LkjIP	36 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100.00%	6 dokumen	12 dokumen	33.33%
4.01.4.01.01.04.02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	24 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100.00%	4 dokumen	8 dokumen	33.33%
4.01.4.01.01.04.03.	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	1	Jumlah Dokumen SKM	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	1 dokumen	2 dokumen	33.33%
		2	Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	12 kali	2 kali	2 kali	100.00%	2 kali	4 kali	33.33%

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja Tahun 2018 nihil, dikarenakan periode Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Tahun 2019-2024, sehingga yang dapat dinilai hanya tahun 2019 saja; dan
2. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2019 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.

Pada tahun anggaran 2019 anggaran Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang sebesar Rp.12.624.706.642,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.031.073.642,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.9.593.633.000,00 dengan total realisasi sebesar Rp.10.296.189.733,00 (81,56%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.800.070.694,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.7.496.119.039,00. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 11 program dan 45 kegiatan.

Realisasi dan faktor penyebab program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :

1. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon ASN
  - a) Capaian indikator kinerja jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan Calon PNS sebesar 0% dikarenakan sampai dengan akhir Desember 2019 tahap Seleksi Penerimaan Calon PNS Formasi 2019 masih sampai pada tahapan Seleksi Administrasi.
  - b) Capaian indikator kinerja jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan PPPK sebesar 0% dikarenakan Seleksi Penerimaan PPPK masih pada tahapan ujian seleksi dan sampai saat ini masih menunggu kepastian payung hukum pengangkatan dari Pemerintah Pusat.
  - c) Capaian indikator kinerja jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS sebesar 0% dikarenakan sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 151 orang CPNS formasi K-2 yang belum mengikuti Diklat Prajabatan. Penyebab belum mengikutinya Diklat prajabatan adalah karena kuota peserta Diklat Dasar dan Prajabatan yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur terbatas sehingga direncanakan CPNS formasi 2018 akan diangkat menjadi PNS pada tahun 2020.
2. Kegiatan Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi, Pengolahan Data dan Identitas Kepegawaian



- a) Capaian indikator kinerja jumlah identitas kepegawaian yang diproses sebesar 60,33% dikarenakan disesuaikan dengan jumlah usulan identitas kepegawaian yang diajukan ke BKPSDM.
3. Kegiatan Penegakan Disiplin Aparatur, LP2P dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
    - a) Capaian indikator kinerja Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang diproses sebesar 82,35% dikarenakan semakin banyaknya kasus pelanggaran disiplin yang dilaporkan. Hal ini sebenarnya karena semakin tingginya kesadaran PNS untuk melaporkan kasus pelanggaran disiplin.
    - b) Capaian indikator kinerja Jumlah e-LHKPN yang dilaporkan sebesar 88,04% dikarenakan dari total jumlah wajib LHKPN Tahun 2019 sebanyak 91 orang, yang melaporkan hanya sebanyak 81 orang karena jumlah pejabat eselon II, III dan Bupati Wakil Bupati yang ada pada saat pelaporan hanya sebanyak 81 orang.
  4. Kegiatan Penataan Pegawai Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi
    - a) Capaian indikator kinerja jumlah kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan 0% disebabkan oleh Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala OPD) yang dianggarkan melalui PAK 2019 tidak terlaksana karena terkendala oleh padatnya jadwal Pusat Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pelaksana Uji Kompetensi yang merupakan salah satu tahapan dari Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
    - b) Capaian indikator kinerja jumlah pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi dan administrasi yang diterbitkan hanya sebesar 36,75%. Hal ini disebabkan dari jumlah pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi dan administrasi yang diterbitkan sebanyak 400 orang, hanya terealisasi sebanyak 147 orang sesuai dengan Kebijakan Bupati Sampang.
    - c) Capaian indikator kinerja Jumlah Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang dilaksanakan sebesar 50% dikarenakan dari jumlah pelaksanaan Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang direncanakan sebanyak 4 kali, hanya terlaksana 2 kali sesuai dengan kebijakan Bupati Sampang.
  5. Kegiatan Penataan Dalam Jabatan Fungsional
    - a) Capaian indikator kinerja jumlah penetapan pengangkatan, penyesuaian, pembebasan, pengangkatan kembali dan pemberhentian jabatan fungsional sebesar 57% dikarenakan dari jumlah jumlah penetapan pengangkatan, penyesuaian, pembebasan, pengangkatan kembali dan pemberhentian jabatan fungsional yang ditargetkan sebanyak 800 orang, jumlah pengangkatan,

penyesuaian, pembebasan, pengangkatan kembali dan pemberhentian jabatan fungsional yang ditetapkan sebanyak 456 orang sesuai usulan dari OPD.

- b) Indikator kinerja jumlah pengangkatan sumpah janji dan atau pelantikan dalam jabatan fungsional yang dilaksanakan dari target 3 kali, terlaksana 1 kali, sehingga capaian hanya sebesar 33,33 %, . Hal ini dikarenakan sebagaimana Surat Bupati Sampang nomor : 800/32/434.303/2018 tanggal 3 januari 2018 Hal : Pendelegasian Wewenang Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional yang telah diperbarui dengan Surat Bupati Sampang Nomor : 800/2614/434.303/2019 tanggal 11 September 2019 hal pendelegasian wewenang pelantikan dan sumpah/janji Jabatan Fungsional, proses pelantikan dan sumpah/janji jabatan jabatan fungsional telah didelegasikan kepada masing-masing instansi pembina jabatan fungsional di daerah antara lain Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan proses dimaksud, mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Tinggi Pratama, Administrasi dan Fungsional. Terkait dengan hal tersebut BKPSDM hanya melaksanakan proses dimaksud terhadap jabatan fungsional non kependidikan dan kesehatan.

6. Kegiatan Fasilitasi Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Kesejahteraan Aparatur

- a) Capaian indikator kinerja jumlah penghargaan (Satya Lencana Karya Satya) yang diproses hanya sebesar 26% dikarenakan dari jumlah usul Satya Lencana Karya Satya yang masuk ke BKPSDM dan diajukan ke Kemendagri sebanyak 76 dokumen, usul yang memenuhi syarat hanya 26 dokumen dikarenakan perubahan persyaratan pengusulan Satya Lencana dari Kemendagri terlambat diterima pada waktu usul sudah dikirim sehingga usul yang tidak memenuhi syarat tersebut akan diusulkan kembali pada periode berikutnya dengan persyaratan yang baru.

7. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional dengan realisasi indikator kinerja jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis dan fungsional sebesar 89,55%, yaitu dari target 67 orang, terealisasi sebanyak 60 orang, terdiri dari : aparatur yang mengikuti Diklat Manajemen Kearsipan sebanyak 30 orang dan aparatur yang mengikuti Diklat Kebidanan (CTU) sebanyak 30 orang. Sedangkan target untuk Diklat Jabatan Fungsional Tertentu tidak terealisasi dikarenakan tidak ada pemanggilan peserta Diklat Jabatan Fungsional dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

8. Kegiatan Penyusunan Pengembangan Karir ASN

- a) Capaian indikator kinerja realisasi jumlah ijin belajar yang diterbitkan sebesar 46% karena sesuai jumlah PNS yang mengajukan ijin belajar dan selesai diproses sebanyak 46 orang dari usulan yang ditargetkan sebanyak 100 orang.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain :

- 1) Merencanakan anggaran dan target kinerja dengan lebih seksama serta melakukan rasionalisasi anggaran kembali terhadap kegiatan-kegiatan yang realisasi penyerapan anggarannya rendah namun kalau dilihat dari target kinerja tercapai.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas BKPSDM, baik provinsi (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Kantor Regional II BKN, dll) maupun pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara- RB, Komisi Aparatur Sipil Negara dan semua instansi pembina jabatan fungsional tertentu)
- 3) Meningkatkan sosialisasi terkait implementasi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ke seluruh OPD, termasuk meningkatkan pembinaan disiplin hingga ke sekolah-sekolah, maupun pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang tidak cakap jasmani/rohani.
- 4) Komitmen kuat dari seluruh stakeholder dalam penataan aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensinya.
- 5) Meningkatkan sosialisasi pengelolaan data kepegawaian dan implementasi pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang 2019-2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten**

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisa
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>Tujuan :</b> <b>Meningkatnya SDM aparatur yang profesional</b>											
1	Indeks Profesionalitas ASN			71	75	77	81	62,21	-	77	81	
	<b>Sasaran 1 :</b> <b>Meningkatnya kualitas penataan ASN</b>											
a.	Persentase penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi			70	72	74	76	68,36	-	74	76	
	<b>Sasaran 2 :</b> <b>Meningkatnya kinerja ASN</b>											
b.	Persentase aparatur dengan nilai PPK minimal "baik"			76	78	80	82	99,26	-	80	82	
			<b>IKK III.1</b>									
			20. Ratio PNS terhadap penduduk	-	-	-	-	0,805 %				
			21. Rasio PNS memiliki kualifikasi pendidikan tinggi minimal DIII (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	-	-	-	-	23,02 %				
			Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	-	Ada				
			<b>IKK III.3</b>									
			11. Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	-	-	-	5,32%				
			12. Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	-	-	-	0%				

Jika dilihat tabel di atas, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Indikator Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Kabupaten Sampang Tahun 2019 yaitu 62,21. Jika dibandingkan dengan target, maka capaian hanya sebesar 87,62%. Adapun nilai masing-masing dimensi sebagaimana berikut :

NO.	DIMENSI	BOBOT DIMENSI	HASIL IP ASN 2019	% TERHADAP BOBOT DIMENSI
1	Kualifikasi	25%	13,05%	52,19%
2	Kompetensi	40%	19,10%	47,77%

3	Kinerja	30%	25,09%	83,62%
4	Disiplin	5%	4,97%	99,36%
	<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>62,21%</b>	

Hasil pengukuran paling rendah persentasenya adalah pada dimensi kompetensi. Hal ini disebabkan karena pengembangan kompetensi yang diikuti oleh ASN Kabupaten Sampang hanya pada diklat penjenjangan saja, baik penjenjangan struktural maupun penjenjangan fungsional sedangkan diklat teknis dan workshop/seminar hanya diikuti oleh sebagian kecil ASN saja.

- b. Indikator persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi diperoleh dari jumlah penempatan PNS yang sesuai kompetensi yaitu sebanyak 4.739 orang dibagi dengan jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Sampang (per 31 Desember 2019) yaitu sebanyak 6.932 orang, sehingga realisasi tersebut dengan capaian 68,36%
- c. Indikator persentase ASN dengan nilai Penilaian Prestasi Kerja minimal “baik” diperoleh dari jumlah ASN dengan nilai PPK 2019 minimal “baik” yaitu sebanyak 6.881 orang dibagi jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Sampang (per 31 Desember 2019) yaitu sebanyak 6.932 orang, sehingga capaian indikator tersebut adalah 99,26%.
- d. IKK rasio PNS terhadap penduduk diperoleh dari jumlah PNS Kabupaten tahun 2019 sebanyak 6.932 orang dibagi Jumlah penduduk Kabupaten tahun 2019 sebanyak 860.649 orang, sehingga realisasi indikator tersebut sebesar 0,805%.
- e. IKK rasio PNS memiliki kualifikasi pendidikan tinggi minimal DIII (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan diperoleh dari Jumlah PNS Kabupaten Tahun 2019 yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi minimal DIII di luar guru dan tenaga kesehatan 1.596 orang dibagi Jumlah PNS Kabupaten tahun 2019 sebanyak 6.932 orang, sehingga realisasi indikator sebesar 23,03%.
- f. Indikator Sistem Informasi Kepegawaian ada yaitu Simpeg Kabupaten Sampang / SIMPEG Webbased dengan sistem database simpegv2 platform linux dan mySQL.
- g. IKK persentase pegawai fungsional terhadap seluruh jumlah pegawai pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) diperoleh dari jumlah PNS fungsional (di luar guru dan kesehatan) sebanyak 131 orang dibagi jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan kesehatan) sebanyak 2.463 orang, sehingga diperoleh realisasi 5,32%.
- h. IKK persentase jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) diperoleh dari jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 0 orang dibagi seluruh jumlah pegawai non

fungsional (PNS tidak termasuk guru dan kesehatan) sehingga diperoleh realisasi 0%.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sebagaimana termuat dalam Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penempatan dan penataan aparatur sipil negara berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi belum sepenuhnya sesuai;
- b. Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya aparatur kepegawaian dalam memenuhi tuntutan masyarakat terhadap Aparatur Sipil Negara yang profesional belum optimal;
- c. Peningkatan fungsi pembinaan dalam rangka meningkatkan kinerja dan disiplin PNS belum optimal;
- d. Pengembangan dan pembangunan sistem informasi manajemen kepegawaian online berbasis teknologi informasi dalam rangka pemutakhiran data belum maksimal; dan
- e. Pengembangan sistem informasi berbasis web yang menyajikan informasi dan pengajuan terkait pelayanan manajemen kepegawaian belum optimal untuk semua jenis pelayanan

Oleh karena itu isu-isu strategis diatas yang harus ditindaklanjuti pada Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang 1 (satu) tahun ke depan adalah :

1. Komposisi pegawai yang ada harus sesuai dengan kebutuhan terutama dalam perencanaan kebutuhan pegawai berbasis kinerja dan kompetensi;
2. Terwujudnya profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur yang terstruktur agar PNS lebih disiplin dan profesional;
4. Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi yang berbasis data elektronik melalui jaringan internet dalam menunjang pelayanan kepegawaian; dan
5. Sistem teknologi informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat, tepat dan transparan sebagai perwujudan *good governance*.

### **2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang sebagai pengampu urusan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan memiliki pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur **Peraturan Bupati Sampang No. 65 Tahun 2017** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah Daerah bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan ;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terait dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang dapat diukur dari :

- a. Adanya peningkatan profesionalitas ASN;
- b. Adanya peningkatan penempatan aparatur sesuai kompetensi; dan
- c. Adanya peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang antara lain:

- a. Perubahan dan perkembangan peraturan di bidang kepegawaian;
- b. Penempatan aparatur sesuai kompetensi masih rendah;
- c. Penilaian kinerja PNS belum secara obyektif;
- d. Masih adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS; dan
- e. Pengelolaan informasi, data dan dokumentasi kepegawaian masih kurang optimal.

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang antara lain :

- a. Jumlah sumber daya manusia (SDM) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang masih kurang mengakibatkan adanya program kerja yang belum dapat dilaksanakan secara optimal;
- b. Sarana dan prasarana yang dimiliki belum memenuhi kebutuhan pelayanan;
- c. Pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi belum optimal;

### **2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);**

Visi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah ***“Sampang Hebat Bermartabat”***. Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, disusunlah misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik;
5. Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu.

Keterkaitan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dengan Misi Kepala daerah adalah pada **misi 4** yaitu ***“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”***

### **2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam meningkatkan pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang menghadapi tantangan sebagai berikut :

- a. Semakin menguatnya kontrol masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah dan tuntutan aparatur sipil negara yang profesional;
- b. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik;



- c. Masih adanya ketidakselarasan kebijakan antar lembaga di pemerintah pusat dan kebijakan yang berubah-ubah;

Sedangkan peluang yang ada antara lain :

- a. Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan Menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang secara ideal;
- b. Adanya dukungan dan peran serta para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang;
- c. Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan pelayanan; dan
- d. Perkembangan teknologi dan informasi.

### **2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang, terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan kinerja perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan *reward and punishment*
- b. Pengumpulan data kinerja harus dilakukan secara berkala dan tampak dalam laporan pengukuran kinerja;
- c. Pengukuran kinerja dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi;
- d. IKU harus dimanfaatkan untuk dokumen perencanaan dan penganggaran;
- e. Hasil pengukuran kinerja harus memberikan dampak terhadap perolehan *reward and punishment*;
- f. IKU harus dilakukan reviu untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kepentingan organisasi;
- g. Laporan kinerja perlu disempurnakan dengan menyajikan sumber daya secara lengkap dalam dokumen serta informasi kinerja dibuat secara rinci dan detail sehingga andal
- h. Informasi kinerja harus dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan, program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja;
- i. Melakukan rencana aksi untuk mengendalikan kinerja;

- j. Melakukan pemantauan rencana aksi untuk memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan;
- k. Informasi kinerja harus dapat digunakan seluruhnya dalam perbaikan perencanaan; dan
- l. Meningkatkan capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2021 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 dengan kebutuhan riil Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang. Review tersebut digambarkan pada tabel T-C.31 berikut :

**Tabel T-C.31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Sampang**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN BKPSDM TAHUN 2021					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.03.	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				5.965.916.800,00	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				5.079.499.300,00	
4.01.4.01.01.0 1.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran		Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100%	855.000.000,00	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran		Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100%	809.088.200,00	
4.01.4.01.01.01.01.	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Kab. Sampang	a. Jumlah surat yang terkirim	3200 surat	355.000.000,00	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Kab. Sampang	a. Jumlah surat yang terkirim	3200 surat	373.545.000,00	
			b. Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air dan komunikasi	12 bulan				b. Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air dan komunikasi	12 bulan		
			c. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang memperoleh jasa perizinan	23 unit				c. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang memperoleh jasa perizinan	23 unit		
			d. Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	48 orang bulan				d. Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	48 orang bulan		
			e. Jumlah alat kebersihan	-				e. Jumlah alat kebersihan	-		
			f. Jumlah tenaga penjaga kantor	36 orang bulan				f. Jumlah tenaga penjaga kantor	24 orang bulan		
			g. Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi / teknis	14 orang bulan				h. Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi / teknis	14 orang bulan		
			i. Jumlah bahan bacaan yang disediakan	730 exp				j. Jumlah bahan bacaan yang disediakan	730 exp		

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN BKPSDM TAHUN 2021					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			i. Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	840 orang kali				i. Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	840 orang kali		
			j. Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	200 orang kali				j. Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	200 orang kali		
4.01.4.01.01.01.02.	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	BKPSDM	a. Jumlah ATK	60 jenis	200.000.000	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	BKPSDM	a. Jumlah ATK	56 jenis	204.050.860	
			b. Jumlah barang cetakan	17 jenis				b. Jumlah barang cetakan	7 jenis		
			c. Jumlah penggandaan	42000 lembar				c. Jumlah penggandaan	36500 lembar		
			d. Jumlah komponen instalasi listrik	13 jenis	-			d. Jumlah komponen instalasi listrik	13 jenis		
			e. Jumlah alat kebersihan yang disediakan	30 jenis	-			e. Jumlah alat kebersihan yang disediakan	30 jenis		
			f. Jumlah bahan bacaan yang disediakan	-				f. Jumlah bahan bacaan yang disediakan	-		
			g. Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	-				g. Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	-		
			h. Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	-				h. Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	-		
4.01.4.01.01.01.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	a. Jumlah koordinasi dalam daerah	52 orang kali	320.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	a. Jumlah koordinasi dalam daerah	52 orang kali	298.905.000	
			b. Jumlah koordinasi luar daerah	100 orang kali	-			b. Jumlah koordinasi luar daerah	100 orang kali	-	
<b>4.01.4.01.01.0 2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>293.916.800,00</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>230.640.000,00</b>	
4.01.4.01.01.02.01.	Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor	BKPSDM	a. Jumlah gedung kantor yang dibangun	0 unit	65.000.000,00	Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor	BKPSDM	a. Jumlah gedung kantor yang dibangun	0 unit	95.680.000,00	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN BKPSDM TAHUN 2021					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			b. Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit				b. Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit		
4.01.4.01.01.02.03.	Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional	BKPSDM	a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan	0 unit	135.000.000,00	Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional	BKPSDM	a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan	0 unit	40.160.000,00	
			b. Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan	0 unit				b. Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan	0 unit		
			c. Jumlah kendaraan dinas R4 yg dipelihara	3 unit				c. Jumlah kendaraan dinas R4 yg dipelihara	4 unit		
4.01.4.01.01.02.04.	Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	BKPSDM	a. Jumlah pengadaan peralatan kantor	92 unit	93.916.800,00	Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	BKPSDM	a. Jumlah pengadaan peralatan kantor	92 unit	94.800.000,00	
			b. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	47 unit				b. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	47 unit		
			c. Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	0 unit				c. Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	0 unit		
			d. Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	0 unit				d. Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	0 unit		
			e. Jumlah spanduk / umbul-umbul / bendera yang disediakan	34 unit				e. Jumlah spanduk / umbul-umbul / bendera yang disediakan	34 unit		
4.01.4.01.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar daerah	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	102.000.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar daerah	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	34.800.000,00	
4.01.4.01.01.03.01.	Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	Luar daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar	11 orang kali	102.000.000,00	Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	Luar daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar	4 orang kali	34.800.000,00	
4.01.4.01.01.04.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	BKPSDM	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100%	45.000.000,00	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	BKPSDM	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100%	43.002.500,00	
4.01.4.01.01.04.01.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	BKPSDM	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulanan, Laporan	6 dok	15.000.000,00	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	BKPSDM	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulanan, Laporan	6 dok	13.765.000,00	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN BKPSDM TAHUN 2021					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Semesteran, Laporan Akhir Tahun, CALK, LkjIP					Semesteran, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKjIP			
4.01.4.01.01.04.02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	BKPSDM	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	4 dok	15.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	BKPSDM	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	4 dok	14.237.500,00	
4.01.4.01.01.04.03.	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	BKPSDM	Jumlah dokumen SKM	1 dok	15.000.000,00	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	BKPSDM	Jumlah dokumen SKM	1 dok	15.000.000,00	
			Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	2 kali	-			Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	2 kali	-	
4.03.4.03.01.15.	<b>Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan Aparatur</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>a. Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan</b>	<b>100%</b>	<b>1.480.000.000,00</b>	<b>Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan Aparatur</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>a. Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan</b>	<b>100%</b>	<b>1.299.138.250,00</b>	
			<b>b. Persentase data ASN yang akurat</b>	<b>100%</b>				<b>b. Persentase data ASN yang akurat</b>	<b>100%</b>		
			<b>c. Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin</b>	<b>100%</b>				<b>c. Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin</b>	<b>100%</b>		
4.03.4.03.01.15.01.	Penyusunan perencanaan dan formasi kepegawaian	BKPSDM	a. Jumlah dokumen formasi yang disusun	1 dokumen	70.000.000,00	Penyusunan perencanaan dan formasi kepegawaian	BKPSDM	a. Jumlah dokumen formasi yang disusun	1 dokumen	70.000.000,00	
			b. Jumlah perpanjangan/ pemberhentian honorer daerah yang diterbitkan	56 orang				b. Jumlah perpanjangan/ pemberhentian honorer daerah yang diterbitkan	56 orang		
4.03.4.03.01.15.02.	Seleksi penerimaan calon ASN	BKPSDM	a. Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan Calon ASN	250 orang	880.000.000,00	Seleksi penerimaan calon ASN	BKPSDM	a. Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan Calon ASN	250 orang	750.000.000,00	
			b. Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	250 orang				b. Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	250 orang		
			c. Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan PPPK	100 orang				c. Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan PPPK	100 orang		
4.03.4.03.01.15.03.	Pembangunan/pengembangan sistem informasi, pengolahan	BKPSDM	a. Jumlah aplikasi yang dibangun/dikembangkan	1 paket	280.000.000,00	Pembangunan/pengembangan sistem informasi, pengolahan	BKPSDM	a. Jumlah aplikasi yang dibangun/dikembangkan	1 paket	280.000.000,00	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN BKPSDM TAHUN 2021					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	data dan identitas kepegawaian		n			data dan identitas kepegawaian					
			b. Jumlah data kepegawaian yang dikelola	7000 orang				b. Jumlah data kepegawaian yang dikelola	7000 orang		-
			c. Jumlah identitas kepegawaian yang diterbitkan	600 dokumen				c. Jumlah identitas kepegawaian yang diterbitkan	600 dokumen		-
4.03.4.03.01.15.04.	Penegakan disiplin aparatur, LP2P dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara	BKPSDM	a. Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin yang diproses	27 kasus	250.000.000,00	Penegakan disiplin aparatur, LP2P dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara	BKPSDM	a. Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin yang diproses	25 kasus	199.138.250,00	
			b. Jumlah pelaksanaan sidak setelah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri	1 kali				b. Jumlah pelaksanaan sidak setelah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri	1 kali		-
			c. Jumlah e-LHKPN yang dilaporkan	92 dokumen				c. Jumlah e-LHKPN yang dilaporkan	92 dokumen		-
			d. Jumlah peserta Pembinaan Motivasi Kerja KORPRI	100 orang				d. Jumlah peserta Pembinaan Motivasi Kerja KORPRI	0 orang		-
			e. Jumlah unit KORPRI yang dilakukan pembinaan KORPRI	42 unit KORPRI				e. Jumlah unit KORPRI yang dilakukan pembinaan KORPRI	0 unit KORPRI		-
4.03.4.03.01.16.	<b>Program Mutasi Kepegawaian</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	<b>100,00%</b>	<b>730.000.000,00</b>	<b>Program Mutasi Kepegawaian</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	<b>100,00%</b>	<b>682.676.250,00</b>	
4.03.4.03.01.16.01.	Penataan pegawai dalam jabatan pimpinan tinggi dan administrasi	BKPSDM	a. Jumlah kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilaksanakan	1 kali	520.000.000,00	Penataan pegawai dalam jabatan pimpinan tinggi dan administrasi	BKPSDM	a. Jumlah kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilaksanakan	1 kali	508.099.850,00	
		BKPSDM	b. Jumlah pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan	200 orang			BKPSDM	b. Jumlah pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan	200 orang		

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN BKPSDM TAHUN 2021					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			tinggi dan adminitrasi yang diterbitkan					tinggi dan adminitrasi yang diterbitkan			
		BKPSDM	c. Jumlah Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang dilaksanakan	2 kali			BKPSDM	c. Jumlah Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang dilaksanakan	3 kali		
4.03.4.03.01.16.02.	Penataan pegawai dalam jabatan fungsional	BKPSDM	a. Jumlah Pengangkatan, Penyesuaian, Pembebasan, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Jabatan Fungsional yang diterbitkan	800 orang	51.500.000,00	Penataan pegawai dalam jabatan fungsional	BKPSDM	a. Jumlah Pengangkatan, Penyesuaian, Pembebasan, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Jabatan Fungsional yang diterbitkan	800 orang	44.577.000,00	
			b. Jumlah Pengangkatan Sumpah Janji / Pelantikan dalam Jabatan Fungsional yang dilaksanakan	4 kali				b. Jumlah Pengangkatan Sumpah Janji / Pelantikan dalam Jabatan Fungsional yang dilaksanakan	4 kali		
			c. Jumlah peserta Sosialisasi Jabatan Fungsional Tertentu	90 orang				c. Jumlah peserta Sosialisasi Jabatan Fungsional Tertentu	120 orang		
4.03.4.03.01.16.03.	Fasilitasi kenaikan pangkat, pensiun dan kesejahteraan aparatur	BKPSDM	a. Jumlah Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	1550 orang	158.500.000,00	Fasilitasi kenaikan pangkat, pensiun dan kesejahteraan aparatur	BKPSDM	a. Jumlah Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	1550 orang	129.999.400,00	
			b. Jumlah penetapan Pensiun yang diterbitkan	180 orang				b. Jumlah penetapan Pensiun yang diterbitkan	180 orang		
			c. Jumlah penghargaan (Satya Lencana Karya Satya) yang diproses	110 orang				c. Jumlah penghargaan (Satya Lencana Karya Satya) yang diproses	110 orang		
			d. Jumlah Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan	1950 orang				d. Jumlah Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan	1950 orang		



Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN BKPSDM TAHUN 2021					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			e. Jumlah cuti yang diterbitkan	85 orang				e. Jumlah cuti yang diterbitkan	85 orang		
4.03.4.03.01.17.	Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir	BKPSDM	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	6%	2.460.000.000,00	Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir	BKPSDM	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	6%	1.980.154.100,00	
4.03.4.03.01.17.01.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan penjurangan	BKPSDM	a. Jumlah aparatur yang mengikuti Latsar dan Diklat Prajabatan	250 orang	1.400.000.000,00	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan penjurangan	BKPSDM	a. Jumlah aparatur yang mengikuti Latsar dan Diklat Prajabatan	0 orang	1.199.735.300,00	
			b. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II / Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk. II)	2 orang	-			b. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II / Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk. II)	5 orang		
			c. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III	2 orang	-			c. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III	2 orang		
			c. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	30 orang	-			c. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	30 orang		
4.03.4.03.01.17.02.	Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional	BKPSDM	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	30 orang	360.000.000,00	Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional	BKPSDM	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	60 orang	280.418.800,00	
4.03.4.03.01.17.03.	Penyusunan pengembangan karir ASN	BKPSDM	a. Jumlah aparatur yang mengikuti Uji Kompetensi	280 orang	700.000.000,00	Penyusunan pengembangan karir ASN	BKPSDM	a. Jumlah aparatur yang mengikuti Uji Kompetensi	70 orang	500.000.000,00	
			b. Jumlah assesesi yang mendapat feedback	120 assesesi				b. Jumlah assesesi yang mendapat feedback	80 assesesi		
			b. Jumlah ijin belajar yang diterbitkan	100 orang				b. Jumlah ijin belajar yang diterbitkan	100 orang		
			c. Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar	10 orang				c. Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar	10 orang		

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN BKPSDM TAHUN 2021					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			d. Jumlah pemberian bantuan biaya pendidikan	5 orang				d. Jumlah pemberian bantuan biaya pendidikan	5 orang		
			e. Persentase aparatur yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	0%				f. Persentase aparatur yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	0%		
			g. Jumlah Unit Kerja yang mengikuti Workshop aplikasi penyusunan rencana pengembangan kompetensi PNS	0 unit kerja				h. Jumlah Unit Kerja yang mengikuti Workshop aplikasi penyusunan rencana pengembangan kompetensi PNS	60 unit kerja		
			i. Jumlah Unit Kerja yang mengikuti sosialisasi pengisian Pengukuran Indeks Profesionalitas (PIP) ASN	80 unit kerja				j. Jumlah Unit Kerja yang mengikuti sosialisasi pengisian Pengukuran Indeks Profesionalitas (PIP) ASN	0 unit kerja		
			h. Jumlah lomba yang diadakan dalam rangka HUT KORPRI	5 jenis				h. Jumlah lomba yang diadakan dalam rangka HUT KORPRI	5 jenis		
			i. Jumlah pelaksanaan kegiatan Rangkaian HUT KORPRI (Upacara, Resepsi dan Ziarah ke TMP)	3 kegiatan				i. Jumlah pelaksanaan kegiatan Rangkaian HUT KORPRI (Upacara, Resepsi dan Ziarah ke TMP)	3 kegiatan		
			j. Jumlah Media KORPRI yang diterbitkan	800 eksemplar				j. Jumlah Media KORPRI yang diterbitkan	200 eksemplar		
<b>TOTAL</b>					<b>5.965.916.800,00</b>	<b>TOTAL</b>					<b>5.079.499.300,00</b>

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2021 sudah sesuai kebutuhan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2021.

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel T-C.32  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Kabupaten Sampang Tahun 2021**

Perangkat Daerah :           Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada kepegawaian, pendidikan dan pelatihan secara umum, sehingga pada bab ini usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang adalah nihil.

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2021 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dengan Tema “**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**”.

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Sampang Tahun 2021**

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1	<b>Prioritas Pembangunan 1:</b> Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	<b>Prioritas Pembangunan 1 :</b> Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata	<b>Prioritas Pembangunan 1:</b> Pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah guna mendukung proses transformasi ekonomi
2	<b>Prioritas Pembangunan 2:</b> Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	<b>Prioritas Pembangunan 2:</b> Penguatan Konektivitas antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	<b>Prioritas Pembangunan 2:</b> Peningkatan kualitas dan perluasan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
3	<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence (AI)</i>	<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> Peningkatan ketahanan social masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan serta sarana dan prasarana dasar
4	<b>Prioritas Pembangunan 4:</b> Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<b>Prioritas Pembangunan 4:</b> Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	<b>Prioritas Pembangunan 5:</b> Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat
5	<b>Prioritas Pembangunan 5:</b> Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	<b>Prioritas Pembangunan 5:</b> Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	<b>Prioritas Pembangunan 1:</b> Pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah guna mendukung proses transformasi ekonomi

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
6	<b>Prioritas Pembangunan 6:</b> Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	<b>Prioritas Pembangunan 6:</b> Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> Peningkatan ketahanan sosial masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan serta sarana dan prasarana dasar
7	<b>Prioritas Pembangunan 7:</b> Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	<b>Prioritas Pembangunan 7:</b> Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	<b>Prioritas Pembangunan 4:</b> Percepatan reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang pada Tahun 2021 sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2021**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021
	<b>Tujuan:</b>		
	Meningkatnya SDM aparatur yang professional	Indeks Profesionalitas ASN	77,00
	<b>Sasaran:</b>		
1	Meningkatnya kualitas penataan ASN	1 Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi	74%
2	Meningkatnya kinerja ASN	1 Persentase ASN dengan nilai PPK minimal "baik"	80%

### 3.3 Program dan Kegiatan

**a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2021**

Dalam merumuskan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mendukung pada pencapaian **misi 4** yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu **Peningkatan Kualitas ASN**. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Selain pencapaian visi dan misi kepala daerah, tujuan dan sasaran daerah juga memperhatikan Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang yang telah disusun.

#### **b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan**

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**.

Adapun program-program yang mendukung pada sasaran tersebut, yaitu:

- Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan Aparatur
- Program Mutasi Kepegawaian
- Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir

Program-program di atas kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2021 sebagaimana terlampir sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 pada sistem aplikasi <https://e->

[planning.sampangkab.go.id/](http://planning.sampangkab.go.id/) yang ditampilkan pada Tabel T-C.33 sebagai berikut :

**Tabel T-C.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022**  
**Pemerintah Kabupaten Sampang**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APBN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
4.03.	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				5,079,499,350.00	-	-	5,079,499,350.00			7,159,100,250.00
4.03.4.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran		100%	809,088,250.00	-	-	809,088,250.00			917,000,000.00
4.03.4.03.01.01.01.	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	a. Jumlah surat terkirim	BKPSDM Kabupaten Sampang	3200 surat	373,545,000.00	-	-	373,545,000.00	-	3200 surat	342,000,000.00
		b. Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi		12 bulan	-	-	-	-		12 bulan	-
		c. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang memperoleh jasa perizinan		23 unit	-	-	-	-		23 unit	-
		d. Jumlah tenaga kebersihan		48 orang bulan	-	-	-	-		48 orang bulan	-
		e. Jumlah tenaga penjaga kantor		24 orang bulan	-	-	-	-		24 orang bulan	-
		f. Jumlah bahan bacaan yang disediakan		730 eksemplar	-	-	-	-		730 eksemplar	-
		g. Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi/teknis		14 orang bulan	-	-	-	-		14 orang bulan	-
		h. Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat		660 orang kali	-	-	-	-		840 orang kali	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APBN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
		i. Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu		120 orang kali	-	-	-	-		200 orang kali	-
4.03.4.03.01.01.02.	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	a. Jumlah alat tulis kantor	BKPSDM Kabupaten Sampang	60 jenis	218,498,250.00	-	-	218,498,250.00	-	60 jenis	220,000,000.00
		b. Jumlah barang cetakan		11 jenis	-	-	-	-		7 jenis	-
		c. Jumlah penggandaan		30000 lembar	-	-	-	-		42000 lembar	-
		d. Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan		13 jenis	-	-	-	-		18 jenis	-
		e. Jumlah alat kebersihan yang disediakan		33 jenis	-	-	-	-		30 jenis	-
4.03.4.03.01.01.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	a. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti	BKPSDM Kabupaten Sampang	39 orang kali	217,045,000.00	-	-	217,045,000.00	-	39 orang kali	355,000,000.00
		b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti		76 orang kali	-	-	-	-		110 orang kali	-
<b>4.03.4.03.01.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>		<b>100%</b>	<b>230,640,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>230,640,000.00</b>			<b>338,850,250.00</b>
4.03.4.03.01.02.01.	Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor	a. Jumlah gedung kantor yang dibangun	BKPSDM Kabupaten Sampang	0 unit	95,680,000.00	-	-	95,680,000.00	-	0 unit	90,000,000.00
		b. Jumlah gedung kantor yang dipelihara		1 unit	-	-	-	-		1 unit	-
4.03.4.03.01.02.03.	Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional	a. Jumlah kendaraan dinas roda empat yang diadakan	BKPSDM Kabupaten Sampang	0 unit	40,160,000.00	-	-	40,160,000.00	-	0 unit	141,000,000.00
		b. Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan		0 unit	-	-	-	-		0 unit	-
		c. Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara		4 unit	-	-	-	-		4 unit	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APBN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
4.03.4.03.01.02.04.	Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	a. Jumlah pengadaan peralatan kantor	BKPSDM Kabupaten Sampang	8 unit	94,800,000.00	-	-	94,800,000.00	-	8 unit	107,850,250.00
		b. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara		51 unit	-	-	-	-		55 unit	-
		c. Jumlah pengadaan perlengkapan kantor		0 unit	-	-	-	-		0 unit	-
		d. Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara		0 unit	-	-	-	-		0 unit	-
		e. Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan		33 unit	-	-	-	-		28 unit	-
<b>4.03.4.03.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>34,800,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34,800,000.00</b>			<b>122,250,000.00</b>
4.03.4.03.01.03.01.	Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi / seminar	BKPSDM Kabupaten Sampang	4 orang kali	34,800,000.00	-	-	34,800,000.00	-	4 orang kali	122,250,000.00
<b>4.03.4.03.01.04.</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan pelayanan publik</b>		<b>100%</b>	<b>43,002,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43,002,500.00</b>			<b>49,500,000.00</b>
4.03.4.03.01.04.01.	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	a. Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun dan LKJIP	BKPSDM Kabupaten Sampang	6 dokumen	13,765,000.00	-	-	13,765,000.00	-	6 dokumen	16,500,000.00
4.03.4.03.01.04.02.	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	a. Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA-SKPD dan DPA-SKPD	BKPSDM Kabupaten Sampang	4 dokumen	14,237,500.00	-	-	14,237,500.00	-	4 dokumen	16,500,000.00
4.03.4.03.01.04.03.	Peningkatan pelayanan informasi publik	a. Jumlah dokumen SKM	BKPSDM Kabupaten Sampang	1 dokumen	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	1 dokumen	16,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APBN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
		b. Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah		2 kali	-	-	-	-		2 kali	-
4.03.4.03.01.15.	<b>Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan Aparatur</b>	<b>Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin</b>		100.00 %	1,299,138,250.00	-	-	1,299,138,250.00			1,657,500,000.00
		<b>Persentase data ASN yang akurat</b>		100.00 %							
		<b>Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan</b>		100.00 %							
4.03.4.03.01.15.01.	Penyusunan perencanaan dan formasi kepegawaian	a. Jumlah dokumen formasi yang disusun	Kabupaten Sampang	1 dokumen	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	1 dokumen	72,500,000.00
		b. Jumlah perpanjangan / pemberhentian honorer daerah yang diterbitkan		56 orang	-	-	-	-		64 orang	-
4.03.4.03.01.15.02.	Seleksi penerimaan calon ASN	a. Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan Calon ASN	Kabupaten Sampang	250 orang	750,000,000.00	-	-	750,000,000.00	-	250 orang	1,050,000,000.00
		b. Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan PPPK		100 orang	-	-	-	-		100 orang	-
		c. Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS		250 orang	-	-	-	-		250 orang	-
4.03.4.03.01.15.03.	Pembangunan/pengembangan sistem informasi, pengolahan data dan identitas kepegawaian	a. Jumlah aplikasi yang dibangun dan atau dikembangkan	Kabupaten Sampang	1 aplikasi (paket)	280,000,000.00	-	-	280,000,000.00	-	1 aplikasi (paket)	340,000,000.00
		b. Jumlah data kepegawaian yang dikelola		7000 orang	-	-	-	-		7000 orang	-
		c. Jumlah identitas kepegawaian yang diterbitkan		600 dokumen	-	-	-	-		600 dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APBN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
4.03.4.03.01.15.04.	Penegakan disiplin aparatur, LP2P dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara	a. Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang diproses	Kabupaten Sampang	25 kasus	199,138,250.00	-	-	199,138,250.00	-	25 kasus	195,000,000.00
		b. Jumlah pelaksanaan sidak setelah Cuti Bersama		1 kali	-	-	-	-		1 kali	-
		c. Jumlah e-LHKPN yang dilaporkan		92 dokumen	-	-	-	-		92 dokumen	-
		d. Jumlah peserta Pembinaan Motivasi Kerja KORPRI		0 orang	-	-	-	-		100 orang	-
		e. Jumlah unit KORPRI yang dilakukan pembinaan KORPRI		0 unit KORPRI	-	-	-	-		0 unit KORPRI	-
<b>4.03.4.03.01.16.</b>	<b>Program Mutasi Kepegawaian</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu</b>		<b>100.00 %</b>	<b>682,676,250.00</b>	-	-	<b>682,676,250.00</b>			<b>984,000,000.00</b>
4.03.4.03.01.16.01.	Penataan pegawai dalam jabatan pimpinan tinggi dan administrasi	a. Jumlah kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan	Kabupaten Sampang	1 kali	508,099,850.00	-	-	508,099,850.00	-	1 kali	700,000,000.00
		b. Jumlah pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi dan administrasi yang diterbitkan		200 orang	-	-	-	-		200 orang	-
		c. Jumlah Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang dilaksanakan		3 kali	-	-	-	-		2 kali	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APBN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
4.03.4.03.01.16.02.	Penataan pegawai dalam jabatan fungsional	a. Jumlah Pengangkatan, Penyesuaian, Pembebasan, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Jabatan Fungsional yang diterbitkan	Kabupaten Sampang	800 orang	44,577,000.00	-	-	44,577,000.00	-	800 orang	84,000,000.00
		b. Jumlah Pengangkatan Sumpah Janji / Pelantikan dalam Jabatan Fungsional yang dilaksanakan		4 kali	-	-	-	-		4 kali	-
		c. Jumlah peserta Sosialisasi Jabatan Fungsional		120 orang	-	-	-	-		120 orang	-
4.03.4.03.01.16.03.	Fasilitasi kenaikan pangkat, pensiun dan kesejahteraan aparatur	a. Jumlah Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	Kabupaten Sampang	1550 orang	129,999,400.00	-	-	129,999,400.00	-	1550 orang	200,000,000.00
		b. Jumlah penetapan Pensiun yang diterbitkan		180 orang	-	-	-	-		190 orang	-
		c. Jumlah penghargaan (Satya Lencana Karya Satya) yang diproses		110 orang	-	-	-	-		112 orang	-
		d. Jumlah Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan		1950 orang	-	-	-	-		1952 orang	-
		e. Jumlah cuti yang diterbitkan		85 orang	-	-	-	-		90 orang	-
<b>4.03.4.03.01.17.</b>	<b>Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir</b>	<b>Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya</b>		<b>6.00 %</b>	<b>1,980,154,100.00</b>	-	-	<b>1,980,154,100.00</b>			<b>3,090,000,000.00</b>
4.03.4.03.01.17.01.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan penjurangan	a. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Latsar bagi CPNS	Kabupaten Sampang	0 orang	1,199,735,300.00	-	-	1,199,735,300.00	-	0 orang	1,850,000,000.00
		b. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III		5 orang	-	-	-	-		8 orang	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APBN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
		b. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II / Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN)		2 orang	-	-	-	-		5 orang	-
		d. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV		30 orang	-	-	-	-		40 orang	-
4.03.4.03.01.17.02.	Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional	a. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	Kabupaten Sampang	60 orang	280,418,800.00	-	-	280,418,800.00	-	60 orang	540,000,000.00
4.03.4.03.01.17.03.	Penyusunan pengembangan karir ASN	a. Jumlah aparatur yang mengikuti Uji Kompetensi	Kabupaten Sampang	70 orang	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00	-	70 orang	700,000,000.00
		b. Jumlah assesi yang mendapat feedback		80 orang	-	-	-	-		80 orang	-
		c. Jumlah ijin belajar yang diterbitkan		100 orang	-	-	-	-		100 orang	-
		d. Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar		10 orang	-	-	-	-		10 orang	-
		e. Jumlah pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Praja IPDN		5 orang	-	-	-	-		5 orang	-
		f. Persentase aparatur yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah		0 %	-	-	-	-		0 %	-
		g. Jumlah Unit Kerja yang mengikuti Workshop aplikasi penyusunan rencana pengembangan kompetensi PNS		60 unit kerja	-	-	-	-		42 unit kerja	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					APBD	APBD Prov.	APBN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (6 + 7 + 8)	10	11	12
		h. Jumlah Unit Kerja yang mengikuti sosialisasi pengisian Pengukuran Indeks Profesionalitas (PIP) ASN		0 unit kerja	-	-	-	-		0 unit kerja	-
		i. Jumlah lomba yang diadakan dalam rangka HUT KORPRI		5 jenis lomba	-	-	-	-		4 jenis lomba	-
		j. Jumlah pelaksanaan kegiatan Rangkaian HUT KORPRI		3 kegiatan	-	-	-	-		3 kegiatan	-
		k. Jumlah penerbitan Media KORPRI		200 eksemplar	-	-	-	-		200 eksemplar	-
<b>TOTAL</b>					<b>5,079,499,350.00</b>	-	-	<b>5,079,499,350.00</b>			<b>7,159,100,250.00</b>

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengampu urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Program-program Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2021 mendukung prioritas pembangunan “**Prioritas 4. Percepatan Reformasi Birokrasi, Penyederhanaan Regulasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**” sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan**  
**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2021**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	<b>Belanja Langsung (BL)</b>			<b>5.079.499.300,00</b>
<b>4.03.</b>	<b>KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			<b>5.079.499.300,00</b>
<b>4.01.4.01.01.0 1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>809.088.200,00</b>
4.01.4.01.01.01.01.	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	a. Jumlah surat yang terkirim	3200 surat	373.545.000,00
		b. Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air dan komunikasi	12 bulan	-
		c. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang memperoleh jasa perizinan	23 unit	-
		d. Jumlah tenaga kebersihan	48 orang bulan	-
		e. Jumlah tenaga penjaga kantor	24 orang bulan	-
		f. Jumlah bahan bacaan yang disediakan	730 eksemplar	
		g. Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi / teknis	14 orang bulan	-
		h. Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	660 orang kali	-
		i. Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	120 orang kali	



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
4.01.4.01.01.01.02.	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	a. Jumlah alat tulis kantor	60 jenis	218.498.200,00
		b. Jumlah barang cetakan	11 jenis	-
		c. Jumlah penggandaan	30000 lembar	-
		d. Jumlah komponen Instalasi listrik yang disediakan	13 jenis	-
		e. Jumlah alat kebersihan yang disediakan	33 jenis	-
4.01.4.01.01.01.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	a. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti	39 orang kali	217.045.000,00
		b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	76 orang kali	-
<b>4.01.4.01.01.0 2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>230.640.000,00</b>
4.01.4.01.01.02.01.	Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor	a. Jumlah gedung kantor yang dibangun	0 unit	95.680.000,00
		b. Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	
4.01.4.01.01.02.03.	Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional	a. Jumlah kendaraan dinas roda empat yang diadakan	0 unit	40.160.000,00
		b. Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan	0 unit	
		c. Jumlah kendaraan dinas roda empat yg dipelihara	4 unit	
4.01.4.01.01.02.04.	Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	a. Jumlah pengadaan peralatan Kantor	8 unit	94.800.000,00
		b. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	51 unit	-
		c. Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	0 unit	-
		d. Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	0 unit	-
		e. Jumlah spanduk / umbul-umbul / bendera yang disediakan	33 unit	-
<b>4.01.4.01.01.03.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>34.800.000,00</b>
4.01.4.01.01.03.01.	Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar	4 orang kali	34.800.000,00
<b>4.01.4.01.01.0 4.</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>43.002.500,00</b>
4.01.4.01.01.04.01.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKjIP	6 dok	13.765.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
4.01.4.01.01.04.02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	4 dok	14.237.500,00
4.01.4.01.01.04.03.	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen SKM	1 dok	15.000.000
		Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	2 kali	-
<b>4.03.4.03.01.15.</b>	<b>Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan Aparatur</b>	<b>a. Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan</b>	<b>100%</b>	<b>1.299.138.250,00</b>
		<b>b. Persentase data ASN yang akurat</b>	<b>100%</b>	-
		<b>c. Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin</b>	<b>100%</b>	-
4.03.4.03.01.15.01.	Penyusunan perencanaan dan formasi kepegawaian	a. Jumlah dokumen formasi yang disusun	1 dokumen	70.000.000,00
		b. Jumlah perpanjangan/ pemberhentian honorer daerah yang diterbitkan	56 orang	-
4.03.4.03.01.15.02.	Seleksi penerimaan calon ASN	a. Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan Calon ASN	250 orang	750.000.000,00
		b. Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	250 orang	-
		c. Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan PPPK	100 orang	-
4.03.4.03.01.15.03.	Pembangunan/pengembangan sistem informasi, pengolahan data dan identitas kepegawaian	a. Jumlah aplikasi yang dibangun/dikembangkan (maintenance Simpeg)	1 paket	280.000.000,00
		b. Jumlah data kepegawaian yang dikelola	7000 orang	-
		c. Jumlah identitas kepegawaian yang diterbitkan	600 dokumen	-
4.03.4.03.01.15.04.	Penegakan disiplin aparatur, LP2P dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara	a. Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin yang diproses	25 kasus	199.138.250,00
		b. Jumlah pelaksanaan sidak setelah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri	1 kali	-
		c. Jumlah e-LHKPN yang dilaporkan	92 dokumen	-
		d. Jumlah peserta Pembinaan Motivasi Kerja KORPRI	0 orang	-
		e. Jumlah unit KORPRI yang dilakukan pembinaan KORPRI	0 unit KORPRI	-
<b>4.03.4.03.01.16.</b>	<b>Program Mutasi Kepegawaian</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	<b>100,00%</b>	<b>682.676.250,00</b>
4.03.4.03.01.16.01.	Penataan pegawai dalam jabatan pimpinan tinggi dan administrasi	a. Jumlah kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilaksanakan	1 kali	508.099.850,00
		b. Jumlah pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi dan administrasi yang diterbitkan	200 orang	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		c. Jumlah Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang dilaksanakan	3 kali	-
4.03.4.03.01.16.02.	Penataan pegawai dalam jabatan fungsional	a. Jumlah Pengangkatan, Penyesuaian, Pembebasan, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Jabatan Fungsional yang diterbitkan	800 orang	44.577.000,00
		b. Jumlah Pengangkatan Sumpah Janji / Pelantikan dalam Jabatan Fungsional yang dilaksanakan	4 kali	-
		c. Jumlah peserta Sosialisasi Jabatan Fungsional Tertentu	120 orang	-
4.03.4.03.01.16.03.	Fasilitasi kenaikan pangkat, pensiun dan kesejahteraan aparatur	a. Jumlah Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	1550 orang	129.999.400,00
		b. Jumlah penetapan Pensiun yang diterbitkan	180 orang	-
		c. Jumlah penghargaan (Satya Lencana Karya Satya) yang diproses	110 orang	-
		d. Jumlah Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan	1950 orang	-
		e. Jumlah cuti yang diterbitkan	85 orang	-
<b>4.03.4.03.01.17.</b>	<b>Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir</b>	<b>Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya</b>	<b>6%</b>	<b>1.980.154.100,00</b>
4.03.4.03.01.17.01.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan penjenjangan	a. Jumlah aparatur yang mengikuti Latsar dan Diklat Prajabatan	222 orang	1.199.735.300,00
		b. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II / Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk. II)	0 orang	-
		c. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III	5 orang	-
		d. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	2 orang	-
4.03.4.03.01.17.02.	Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	60 orang	280.418.800,00
4.03.4.03.01.17.03.	Penyusunan pengembangan karir ASN	a. Jumlah aparatur yang mengikuti Uji Kompetensi	70 orang	500.000.000
		b. Jumlah assesni yang mendapat feedback	80 orang	
		c. Jumlah ijin belajar yang diterbitkan	100 orang	
		d. Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar	10 orang	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		e. Jumlah pemberian bantuan biaya pendidikan	5 orang	
		f. Persentase aparatur yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	0%	
		g. Jumlah Unit Kerja yang mengikuti Workshop aplikasi penyusunan rencana pengembangan kompetensi PNS	0 unit kerja	
		h. Jumlah Unit Kerja yang mengikuti sosialisasi pengisian Pengukuran Indeks Profesionalitas (PIP) ASN	0 unit kerja	
		i. Jumlah lomba yang diadakan dalam rangka HUT KORPRI	5 jenis	
		j. Jumlah pelaksanaan kegiatan Rangkaian HUT KORPRI (Upacara, Resepsi dan Ziarah ke TMP)	3 kegiatan	
		k. Jumlah Media KORPRI yang diterbitkan	200 eksemplar	
<b>TOTAL</b>				<b>5.079.499.300,00</b>

Pada Tahun 2021 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melaksanakan Urusan Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan anggaran sebesar **Rp.5.079.499.300,00** yang digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 7 program dan 20 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan tersebut yaitu di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan lingkup Kabupaten Sampang.

#### 4.2 Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2021

Inovasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2021 adalah Pengembangan **SI ASEP (Sistem Informasi Absensi PNS Kabupaten Sampang)** yang dibiayai pada Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan Aparatur Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi, Pengolahan Data dan Identitas Kepegawaian.

**SI ASEP (Sistem Informasi Absensi PNS Kabupaten Sampang)** digunakan sebagai pengganti absensi manual kertas sebagai indikator kehadiran PNS pada jam kerja, upacara, maupun acara kedinasan lainnya serta dapat dijadikan salah satu bukti kehadiran di lokasi/tujuan apabila sedang melaksanakan tugas luar atau perjalanan dinas. Adapun tujuan dan manfaatnya adalah sebagai berikut :

- Tujuan :
  - a. Mengontrol kehadiran PNS pada jam kerja maupun acara kedinasan lainnya.

- b. Meningkatkan kedisiplinan PNS.
  - Manfaat :
    - a. Praktis, mencegah terjadinya 'titip absen', mengurangi kemungkinan manipulasi terhadap data kehadiran, langsung tercatat dalam database.
    - b. Memberikan kemudahan dalam pengelolaan/ merekap kehadiran PNS
    - c. Mendapatkan laporan kehadiran PNS secara cepat dan akurat
- Selain pengembangan SI ASEP, juga pengembangan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kenaikan gaji berkala berbasis website.

## **BAB V PENUTUP**

Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sampang yang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yaitu **“Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat melalui penguatan kontribusi sektor unggulan, kesehatan, dan infrastruktur menuju Sampang Hebat Bermartabat”**.

Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan teknis yang memuat rencana program dan kegiatan dalam urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang bersumber pada APBD Tahun Anggaran 2021 dan hasil evaluasi atas Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang tahun lalu.

Dengan adanya Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan arah kebijakan program dan kegiatan pelayanan dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien untuk mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

### **5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut**

Dalam rangka pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2021, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;

2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

**BUPATI SAMPANG,**



**H. SLAMET JUNAIDI**



# **LAMPIRAN**

**RENCANA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2021**



**PEMETAAN ANTARA NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA-RENJA PERANGKAT DAERAH  
DENGAN NOMENKLATUR PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019**

BKPSDM KAB. SAMPANG

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									KETERANGAN			
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	
BKPSDM	4.03.4.03.01.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5				
	4.03.4.03.01.15.			Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan Aparatur	- Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan	100	%					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	- Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02		
					- Persentase data ASN yang akurat	100	%						- Persentase data ASN yang akurat	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02		
					- Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin	100	%						- Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02		
	4.03.4.03.01.15.01.			Penyusunan Perencanaan dan Formasi Kepegawaian	Jumlah dokumen formasi yang disusun	1	dokumen	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen formasi yang disusun	Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen formasi yang disusun	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.02	01
					Jumlah perpanjangan / pemberhentian honorer daerah yang diterbitkan	56	orang	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah perpanjangan / pemberhentian honorer daerah yang diterbitkan	Administrasi Kepegawaian	Jumlah perpanjangan / pemberhentian honorer daerah yang diterbitkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.02	01
	4.03.4.03.01.15.02.			Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan Calon ASN	250	orang	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan Calon ASN	Administrasi Kepegawaian	Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan Calon ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.02	01
					Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan PPPK	100	orang	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan PPPK	Administrasi Kepegawaian	Jumlah peserta yang lulus Seleksi Penerimaan PPPK	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.02	01
					Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	500	orang	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	Administrasi Kepegawaian	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi yang ditetapkan	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.02	01
	4.03.4.03.01.15.03.			Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi, Pengolahan Data dan Identitas Kepegawaian	Jumlah aplikasi yang dibangun dan atau dikembangkan	1	aplikasi (paket)	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi yang dibangun dan atau dikembangkan	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah aplikasi yang dibangun dan atau dikembangkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data ASN yang akurat	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.01	03
					Jumlah data kepegawaian yang diupdate	7000	orang	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Jumlah data kepegawaian yang diupdate	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah data kepegawaian yang diupdate	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data ASN yang akurat	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.01	01
					Jumlah data kepegawaian yang diupdate			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang diupdate	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah data kepegawaian yang diupdate	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data ASN yang akurat	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.01	04
					Jumlah identitas kepegawaian yang diterbitkan (Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, dll)	600	dokumen	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah identitas kepegawaian yang diterbitkan (Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, dll)	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah identitas kepegawaian yang diterbitkan (Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, dll)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data ASN yang akurat	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.01	04
					Jumlah fasilitasi Penilaian Kinerja ASN	1	kali	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Jumlah Fasilitasi Penilaian Kinerja ASN	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Fasilitasi Penilaian Kinerja ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data ASN yang akurat	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.03	02
	4.03.4.03.01.15.04.			Penegakan Disiplin Aparatur, LP2P dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang diproses	25	kasus	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang diproses	Pembinaan ASN	Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang diproses	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.05	01
					Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang diproses			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang diproses	Pembinaan ASN	Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang diproses	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.05	02
					Jumlah pelaksanaan sidak setelah Cuti Bersama	1	kali	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pelaksanaan sidak setelah Cuti Bersama	Pembinaan ASN	Jumlah pelaksanaan sidak setelah Cuti Bersama	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.05	01

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										KETERANGAN			
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
					Jumlah e-LHKPN yang dilaporkan	92	dokumen	Penegakan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah e-LHKPN yang dilaporkan	Pembinaan ASN	Jumlah e-LHKPN yang dilaporkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.05	01	
					Jumlah unit KORPRI yang dilakukan pembinaan KORPRI	0	unit KORPRI	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Jumlah unit KORPRI yang dilakukan pembinaan KORPRI	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah unit KORPRI yang dilakukan pembinaan KORPRI	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.03	04	
					Jumlah peserta Pembinaan Motivasi Kerja KORPRI	100	orang	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Jumlah peserta Pembinaan Motivasi Kerja KORPRI	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah peserta Pembinaan Motivasi Kerja KORPRI	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.03	04	
	4.03.4.03.01.16.			Program Mutasi Kepegawaian	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100	%					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02			
	4.03.4.03.01.16.01.			Penataan Pegawai Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	Jumlah kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan	1	kali	Penataan dan Mutasi Jabatan	Jumlah kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan	Administrasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.02	02	
								Pengelolaan Mutasi ASN		Administrasi Kepegawaian		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.02	08	
								Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN		Administrasi Kepegawaian		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.02	09	
					Jumlah pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi dan administrasi yang diterbitkan	200	orang	Penataan dan Mutasi Jabatan	Jumlah pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi dan administrasi yang diterbitkan	Administrasi Kepegawaian	Jumlah pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi dan administrasi yang diterbitkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.02	02	
								Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, dan Kepangkatan	Jumlah pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi dan administrasi yang diterbitkan	Administrasi Kepegawaian	Jumlah pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi dan administrasi yang diterbitkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.02	03	
					Jumlah Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang dilaksanakan	3	kali	Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN	Jumlah Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang dilaksanakan	Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang dilaksanakan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.02	08	
	4.03.4.03.01.16.02.			Penataan Pegawai dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Pengangkatan, Penyesuaian, Pembebasan, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Jabatan Fungsional yang diterbitkan	800	orang	Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional	Jumlah Pengangkatan, Penyesuaian, Pembebasan, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Jabatan Fungsional yang diterbitkan	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Pengangkatan, Penyesuaian, Pembebasan, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Jabatan Fungsional yang diterbitkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.01	02	
					Jumlah Pengangkatan Sumpah Janji / Pelantikan dalam Jabatan Fungsional yang dilaksanakan	4	kali	Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional	Jumlah Pengangkatan Sumpah Janji / Pelantikan dalam Jabatan Fungsional yang dilaksanakan	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Pengangkatan Sumpah Janji / Pelantikan dalam Jabatan Fungsional yang dilaksanakan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.01	02	
					Jumlah peserta Sosialisasi Jabatan Fungsional	120	orang	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah peserta Sosialisasi Jabatan Fungsional	Administrasi Kepegawaian	Jumlah peserta Sosialisasi Jabatan Fungsional	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.03	09	
	4.03.4.03.01.16.03.			Fasilitasi Kenaikan Pangkat, Peniun dan Kesejahteraan Aparatur	Jumlah Keputusan Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	1550	orang	Pembuatan Daftar Kenaikan Pangkat	Jumlah Keputusan Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	Administrasi Kepegawaian	Jumlah Keputusan Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.02	09	
								Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Administrasi Kepegawaian		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.02	10	
					Jumlah Keputusan Peniun yang diterbitkan	180	orang	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Peniun	Jumlah Keputusan Peniun yang diterbitkan	Administrasi Kepegawaian	Jumlah Keputusan Peniun yang diterbitkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.02	04	
								Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai		Administrasi Kepegawaian		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.02	05	
					Jumlah Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan	1950	orang	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan	Pembinaan ASN	Jumlah Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.05	03	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										KETERANGAN			
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
					Jumlah penghargaan (Satya Lencana Karya Satya) yang diproses	110	orang	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah penghargaan (Satya Lencana Karya Satya) yang diproses	Pembinaan ASN	Jumlah penghargaan (Satya Lencana Karya Satya) yang diproses	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.05	03	
					Jumlah cuti yang diterbitkan	85	orang	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah cuti yang diterbitkan	Pembinaan ASN	Jumlah cuti yang diterbitkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	KEPEGAWAIAN	PENDUKUNG	5	03	02	2.05	03	
	4.03.4.03.01.17.			Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	6	%					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PENDUKUNG	5	04	02			
	4.03.4.03.01.17.01.			Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Penjurangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Latsar bagi CPNS	12	orang	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Latsar bagi CPNS	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Latsar bagi CPNS	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PENDUKUNG	5	04	02	2.02	07	
					Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II / Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tk. II (PKN Tk. II)	0	orang	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II / Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tk. II (PKN Tk. II)	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II / Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tk. II (PKN Tk. II)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PENDUKUNG	5	04	02	2.02	07	
					Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III	5	orang	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PENDUKUNG	5	04	02	2.02	07	
					Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV	40	orang	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PENDUKUNG	5	04	02	2.02	07	
	4.03.4.03.01.17.02.			Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	90	orang	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PENDUKUNG	5	04	02	2.02	07	
	4.03.4.03.01.17.03.			Penyusunan Pengembangan Karir ASN	Jumlah aparatur yang mengikuti Uji Kompetensi	80	orang	Pengembangan Assessment Center	Jumlah aparatur yang mengikuti Uji Kompetensi	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah aparatur yang mengikuti Uji Kompetensi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya			5	03	02	2.03.	03	
					Jumlah asesi yang mendapat feedback	80	asesi	Pengembangan Assessment Center	Jumlah asesi yang mendapat feedback	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah asesi yang mendapat feedback	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya			5	03	02	2.03.	03	
					Jumlah ijin belajar yang diterbitkan	100	orang	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah ijin belajar yang diterbitkan	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah ijin belajar yang diterbitkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya			5	03	02	2.03.	01	
					Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar	10	orang	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya			5	03	02	2.03.	01	
					Jumlah pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Praja IPDN	5	orang														tidak ada sub kegiatan yang cocok
					Persentase aparatur yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	0	%	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Persentase aparatur yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Pengembangan Karir ASN	Persentase aparatur yang lulus Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya			5	03	02	2.04	02	
					Jumlah Unit Kerja yang mengikuti Workshop aplikasi penyusunan rencana pengembangan kompetensi PNS	42	unit kerja	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Jumlah Unit Kerja yang mengikuti Workshop aplikasi penyusunan rencana pengembangan kompetensi PNS	Pengembangan Karir ASN	Jumlah Unit Kerja yang mengikuti Workshop aplikasi penyusunan rencana pengembangan kompetensi PNS	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya			5	03	02	2.04	02	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									KETERANGAN				
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
					Jumlah Unit Kerja yang mengikuti sosialisasi pengisian Pengukuran Indeks Profesionalitas (PIP) ASN	0	unit kerja	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Jumlah Unit Kerja yang mengikuti sosialisasi pengisian Pengukuran Indeks Profesionalitas (PIP) ASN	Pengembangan Karir ASN	Jumlah Unit Kerja yang mengikuti sosialisasi pengisian Pengukuran Indeks Profesionalitas (PIP) ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya			5	03	02	2.04	02	
					Jumlah lomba yang diadakan dalam rangka HUT KORPRI	10	jenis	Fasilitas Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Jumlah lomba yang diadakan dalam rangka HUT KORPRI	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah lomba yang diadakan dalam rangka HUT KORPRI	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya			5	03	02	2.03	04	
					Jumlah pelaksanaan kegiatan Rangkaian HUT KORPRI (Upacara, Resepsi dan Ziarah ke TMP)	3	kegiatan	Fasilitas Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Jumlah pelaksanaan kegiatan Rangkaian HUT KORPRI (Upacara, Resepsi dan Ziarah ke TMP)	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah pelaksanaan kegiatan Rangkaian HUT KORPRI (Upacara, Resepsi dan Ziarah ke TMP)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya			5	03	02	2.03	04	
					Jumlah penerbitan Media KORPRI	200	eksemplar	Fasilitas Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Jumlah penerbitan Media KORPRI	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah penerbitan Media KORPRI	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya			5	03	02	2.03	04	
	4.03.4.03.01.01.				Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01			
	4.03.4.03.01.01.01.			Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah surat yang terkirim	3200	surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Administrasi Umum	Jumlah surat yang terkirim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2.03	01	
					Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	12	bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	Administrasi Umum	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2.03	02	
					Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	23	unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	Administrasi Umum	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2.03	06	
					Jumlah tenaga kebersihan	48	orang bulan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	Administrasi Umum	Jumlah tenaga kebersihan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2.03	08	
					Jumlah tenaga penjaga kantor	24	orang bulan														tidak ada sub kegiatan yang cocok
					Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi / teknis	14	orang bulan														tidak ada sub kegiatan yang cocok
					Jumlah bahan bacaan yang disediakan	730	eksemplar	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Administrasi Umum	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2.03	15	
					Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	715	orang kali	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2.03	17	
					Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	200	orang kali	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2.03	17	
	4.03.4.03.01.01.02.			Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	60	jenis	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Administrasi Umum	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2.03	10	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										KETERANGAN			
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
					Jumlah cetakan yang disediakan	7	jenis	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang disediakan	Administrasi Umum	Jumlah cetakan yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2.03	11	
					Jumlah penggandaan	37000	lembar	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	Administrasi Umum	Jumlah penggandaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2.03	11	
					Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	18	jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Administrasi Umum	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2.03	12	
					Jumlah alat kebersihan yang disediakan	30	jenis		Jumlah alat kebersihan yang disediakan	Administrasi Umum	Jumlah alat kebersihan yang disediakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran								
	4.03.4.03.01.01.03.			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti	39	orang kali														tidak ada sub kegiatan yang cocok
					Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	101	orang kali	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Administrasi Umum	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			5	03	01	2.03	18	
	4.03.4.03.01.02.			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	%					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			5	03	01			
	4.03.4.03.01.02.01.			Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0	unit														tidak ada sub kegiatan yang cocok
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			5	03	01	2.03	28	
	4.03.4.03.01.02.03.			Pengadaan / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang diadakan	0	unit	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang diadakan	Administrasi Umum	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang diadakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			5	03	01	2.03	20	
					Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan	0	unit	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan	Administrasi Umum	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			5	03	01	2.03	20	
					Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	4	unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	Administrasi Umum	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			5	03	01	2.03	30	
	4.03.4.03.01.02.04.			Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	15	unit	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	Administrasi Umum	Jumlah pengadaan peralatan kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			5	03	01	2.03	24	
					Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	101	unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			5	03	01	2.03	34	
					Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	0	unit	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			5	03	01	2.03	22	
					Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	0	unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			5	03	01	2.03	32	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										KETERANGAN		
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
					Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	33	unit												tidak ada sub kegiatan yang cocok	
	4.03.4.03.01.03.			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100	%					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur			5	03	01		
	4.03.4.03.01.03.01.			Pelaksanaan BinteK / Sosialisasi / Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti binteK/sosialisasi / seminar	11	orang kali	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti binteK/sosialisasi / seminar	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah ASN yang mengikuti binteK/sosialisasi / seminar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur			5	03	01	2.04	11
	4.03.4.03.01.04.			Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100	%					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu			5	03	01		
	4.03.4.03.01.04.01.			Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun dan LKJIP	6	dokumen	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun dan LKJIP	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun dan LKJIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu			5	03	01	2.02	06
								Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu			5	03	01	2.02	07
								Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu			5	03	01	2.02	09
	4.03.4.03.01.04.02.			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD	4	dokumen	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu			5	03	01	2.01	01
	4.03.4.03.01.04.03.			Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen SKM yang disusun	1	dokumen	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SKM yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SKM yang disusun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu			5	03	01	2.01	03
					Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	2	kali													tidak ada sub kegiatan yang cocok

Sampang, Juni 2020

Pit. KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG


  
**Ir. Hj. UMI HANIK LAILA, MM**

 Pembina Tk. I  
 NIP. 19661202 199303 2 004



